

IMPLEMENTASI PROGRAM BAJAK GRATIS BRIGADE ALSINTAN BAGI PETANI SEBAGAI PROGRAM UNGGULAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

Fadel Muhammad

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
fadel3112mhd@gmail.com

Rahmadani Yusran

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
yusranrny@fis.unp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program Bajak Gratis Brigade Alsintan Bagi Petani Sebagai Program Unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana dalam metode tersebut memiliki tujuan untuk mendeskripsikan hal yang terjadi sesuai dengan kondisi disaat penelitian dilakukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Bajak Gratis Brigade Alsintan terdapat faktor faktor pendukung diantaranya Pertama, adanya regulasi yang jelas, dengan dasar hukumnya Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022. Regulasi ini memberikan panduan dan kerangka kerja yang pasti bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, manajer alsintan, dan kelompok tani. Kedua, dukungan penyuluh pertanian, yang mana mereka bertanggung jawab memberikan pengarahan, pembinaan, dan penyuluhan kepada petani, serta mendampingi mereka dalam penggunaan dan perawatan alat mesin pertanian (alsintan). Adapun Faktor faktor penghambat meliputi Pertama, terbatasnya kuota layanan dalam program bajak gratis. Kedua, Program Bajak Gratis belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan petani saat ini. Para petani lebih membutuhkan ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau, karena harga pupuk yang mahal sangat memberatkan biaya produksi mereka.

Kata Kunci : faktor pendukung, faktor penghambat, Bajak Gratis, Brigade Alsintan

Abstract

This study aims to determine the Supporting Factors and Inhibiting Factors in the Implementation of the Free Plowing Program of the Alsintan Brigade for Farmers as a Leading Program of the Tanah Datar Regency Government. In this study, the researcher used a qualitative descriptive method where the method aims to describe what happened according to the conditions when the research was conducted. Data collection techniques in this study were interviews and documentation. Data were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The results of the study showed that the Implementation of the Free Plowing Program of the Alsintan Brigade had supporting factors, including First, the existence of clear regulations, with the legal basis being Regent Regulation Number 54 of 2022. This regulation provides definite guidance and framework for all parties involved, including local governments, alsintan managers, and farmer groups. Second, support from agricultural extension workers, who are responsible for providing direction, guidance, and counseling to farmers, as well as assisting them in the use and maintenance of agricultural machinery (alsintan). The inhibiting factors include First, the

limited service quota in the free plowing program. Second, the Free Plowing Program has not fully met the needs of farmers today. Farmers need more availability of fertilizer at affordable prices, because the expensive price of fertilizer is very burdensome for their production costs.

Keywords: *Supporting factors, inhibiting factors, Free Plowing, Alsintan Brigade*

PENDAHULUAN

Sektor pertanian memiliki peranan yang dominan dalam struktur ekonomi di Indonesia. Dilihat dari segi geografis, Indonesia letaknya sangat menguntungkan dan memungkinkan untuk menjadi penghasil berbagai jenis pertanian yang menjadi salah satu sektor terpenting dalam perekonomian Indonesia. Sekitar 2/3 rakyat Indonesia hidup dalam usaha pertanian, sehingga memberikan sumbangan besar bagi pendapatan Nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2022 mencatat, kontribusi sektor pertanian di Indonesia mencapai 12,40% terhadap produk domestik bruto (PDB) berdasarkan harga berlaku (ADHB).(BPS Indonesia 2022).

Besarnya peranan sektor pertanian telah menjadikan sektor ini sebagai salah satu prioritas utama dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2045. Pembangunan sektor pertanian pada dasarnya memiliki fokus utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menjamin tercapainya ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia (Setiawan et al., 2021). Pembangunan pertanian memiliki fokus utama dengan adanya peningkatan produksi pertanian, hal ini dapat dicapai melalui kebijakan di sektor pertanian, dengan peningkatan produk pangan dengan strategi intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi pertanian dengan tujuan peningkatan kesejahteraan petani, serta memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian (Amelia Dina et al. (2022).

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu dari 10 provinsi penghasil beras terbesar di Indonesia. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa dari periode Januari hingga September 2023 produksi beras di Indonesia mencapai angka 26,11 juta ton. Jumlah tersebut diakumulasikan dari berbagai provinsi di Indonesia. Provinsi Sumatera Barat menempati urutan ke 10 dengan produksi beras sebesar 843.297 ton (databoks.2023). Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu sentra produksi padi di Sumatera Barat. Dalam penelitian ini peneliti akan fokuskan ke

Kabupaten Tanah Datar yang merupakan salah satu kabupaten sentra penghasil padi di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Tanah Datar menunjukkan komitmen yang signifikan terhadap pengembangan sektor pertanian, mengingat mayoritas mata pencaharian dan sumber pendapatan masyarakat berasal dari sektor tersebut. Hal ini tercermin dalam visi kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar periode 2021-2026, yang bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat dan memperluas lapangan kerja melalui sektor pertanian, industri, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menyoroti pentingnya sektor pertanian dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Signifikansi ini tercermin dalam kontribusi sektor pertanian yang mencapai 29,81% terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Keadaan topografi yang bergunung-bukit dan luasnya lahan pertanian mencapai 63.630 hektar menjadikan Tanah Datar sebagai lokasi yang ideal untuk pengembangan sektor pertanian terutama tanaman hortikultura dan sayuran (Rhian Dkincai 2021).

Sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar menetapkan kebijakan Bajak Gratis Brigade Alsintan yang terdapat dalam peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 56 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bajak Gratis. Bajak gratis merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang bertujuan untuk meringankan beban petani dalam mengolah lahan pertanian terutama lahan basah atau sawah dan mengurangi biaya produksi, Percepatan tanam, Meningkatkan IP (Indeks Pertanaman), Meningkatkan produksi, dan Peningkatan Pendapatan bagi petani. Demi mendukung program prioritas tersebut dan memperbaiki efisiensi penggunaan Alsintan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memutuskan untuk membentuk Brigade Alsintan. Tugas utama Brigade Alsintan adalah memberikan bantuan pertanian kepada petani dengan menggunakan alat-alat modern tersebut guna memperkuat aktivitas pertanian.

Brigade Alsintan adalah sebuah unit yang bertanggung jawab dalam menyediakan layanan bagi alat dan mesin pertanian. Fokus utamanya adalah memanfaatkan berbagai alat dan mesin pertanian yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta sumbangan dari pihak lainnya. Tujuan utamanya

adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai tahapan produksi pertanian, mulai dari persiapan lahan hingga pemasaran hasil akhir. Dengan adanya Brigade Alsintan, diharapkan proses-proses seperti penanaman, panen, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian seperti tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dapat berjalan dengan lebih optimal. Pembentukan Brigade Alsintan merupakan upaya pemanfaatan Alsintan yang didanai oleh Kementerian Pertanian. Tujuan pemanfaatan ini adalah agar pengelolaan Alsintan melalui Brigade Alsintan dapat memberikan contoh dan mengawal penggunaan Alsintan oleh poktan/gapoktan/Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) (Kementrian Pertanian.2017).

Tabel 1. Luas Panen, Produksi, Tanaman Padi di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2022

Tahun	Luas Panen (Hektar)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kuintal/Hektar)
2018	34767.30	183124.27	52.67
2019	34615.67	194266.51	56.12
2020	32729.08	174619.32	53.35
2021	32375.24	182566.15	56.39
2022	31023.69	169881.11	54.76

Sumber : Data BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022

Tabel 1. menunjukkan ada penurunan konsisten dari tahun 2018 hingga 2022 dalam luas panen di Kabupaten Tanah Datar menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi dalam meningkatkan produksi padi di wilayah tersebut. Luas panen yang semula mencapai 34.767,30 hektar pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 31.023,69 hektar pada tahun 2022, yang berarti penurunan sekitar 11% dalam kurun waktu tersebut. Selain itu, produksi padi juga mengalami penurunan, mencapai puncaknya pada tahun 2019 dengan 194.266,51 ton, tetapi menurun menjadi 169.881,11 ton pada tahun 2022. Produktivitas padi, yang biasanya stabil di sekitar 50-an kuintal per hektar, mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan 56,39 kuintal per hektar, tetapi fluktuasi produktivitas tidak dapat mengatasi penurunan luas panen dan produksi padi. Penurunan luas panen dan produksi padi ini menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi, meskipun produktivitas per hektar tetap tinggi. Intervensi diperlukan untuk meningkatkan luas lahan yang

digunakan untuk budidaya padi serta mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan produksi. Penurunan ini cukup signifikan dan terjadi meskipun telah dilaksanakan program layanan bajak gratis. Hal ini mengindikasikan bahwa program tersebut belum optimal dalam meningkatkan produksi padi di Kabupaten Tanah Datar. Oleh karena itu, pemerintah dan organisasi terkait perlu melakukan evaluasi dan perbaikan program tersebut untuk meningkatkan efektivitasnya dalam meningkatkan produksi padi di Kabupaten Tanah Datar.

STUDI LITERATUR

Implementasi merupakan penerapan suatu kebijakan yang telah buat oleh badan atau seorangan yang telah diberi wewenang oleh negara. Implementasi adalah upaya dari pelaksanaan keputusan kebijakan. Secara sederhana implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan Selanjutnya Syauckani dalam (Mamonto et al 2018) implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.

Penelitian yang dilakukan oleh Elfirda Simatupang, dkk. Tentang Implementasi Kebijakan Program Unggulan Pertanian Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di Era Pandemi COVID-19 (2021) menyebutkan bahwa Implementasi kebijakan Program Unggulan Pertanian belum terealisasi secara maksimal, meskipun DPKP Ogan Ilir telah menjalankan fungsi sebagai implementor kebijakan dengan baik. Beberapa permasalahan implementasi kebijakan Program Unggulan Pertanian, diantaranya adalah sulit mobilisasi petani, minimnya anggaran, terbatasnya sarana dan prasarana, kelangkaan pupuk bersubsidi, dan belum ada insentif material untuk para petani yang terlibat dalam Program Unggulan Pertanian. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang program unggulan di sektor pertanian yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Kedua, Penelitian yang

dilakukan oleh Angga Kusuma Wijaya, dkk. Tentang Strategi Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Kehutanan Dalam Meningkatkan Produktivitas Pertanian Di Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda (2018) menyebutkan bahwa adanya adanya strategi yang telah diimplementasikan oleh Dinas terkait untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Strategi tersebut melibatkan pemberdayaan kelembagaan petani, penyediaan sarana prasarana dan produk pertanian, peningkatan intensitas pemanfaatan lahan, serta promosi dan pembentukan agropolitan. Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Nila Riska, dkk. Tentang Strategi Pemanfaatan Program Brigade Alat Dan Mesin Pertanian (BAST) (2020) menyebutkan bahwa Program brigade alat dan mesin pertanian (BAST) memberikan alternatif lain dari kurangnya pemanfaatan alat yang tersedia di petani. Namun pada realitasnya kebutuhan alsintan belum terpenuhi seperti masa pinjam alat yang singkat, belum ada upaya dalam pendekatan pada BAST, dan tenaga operator alat tidak fokus. Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Mili Yanti, dkk. Tentang Analisis Penggunaan Alsintan dalam Peningkatan Pendapatan Petani Padi Sawah Di P4s Ambona Yanda (Studi Kasus Desa Paku Kecamatan Binuang) (2020) menyebutkan bahwa peranan alsintan terhadap peningkatan produktivitas pada dan pendapatan petani serta perbandingan pendapatan petani yang menggunakan alsintan dan tanpa alsintan. Dalam penelitian ini didapatkan bahwasanya pendapatan petani yang menggunakan alsintan lebih tinggi dibandingkan dengan petani yang tanpa menggunakan alsintan.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Supratman Tahir Tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Program Penyediaan Dan Pengawasan Alsintan Di Kabupaten Sinjai (2022) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan program penyediaan dan pengawasan Alsintan di Kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa pengadaan bantuan Alsintan dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Sinjai melalui proses permohonan yang diajukan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Selanjutnya, permohonan ini akan diverifikasi oleh tim melalui survei lapangan dan pengumpulan data CP/CL (Catatan Pertanian/Catatan Lahan). Hal ini menggambarkan proses pengadaan Alsintan yang melibatkan tahap-tahap tertentu dan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memfasilitasi petani dengan peralatan pertanian yang diperlukan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif ini melibatkan pengamatan terhadap informan sebagai subjek penelitian dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka. Menurut (Sudaryono 2018), pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif adalah upaya untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata. Jenis dan sumber data adalah subjek asal data penelitian. Peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data. Sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespons atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan (Sujarweni 2023). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara sebagai sumber data primer dan dokumentasi sebagai sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data (Tricilia and Yusran 2024).

Peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Pemilihan informan dalam penelitian ini berdasarkan pada karakteristik tertentu (Purposive Sampling), yaitu orang-orang yang memahami dan terlibat langsung dengan permasalahan yang diteliti (Nasution 2023). Sehingga Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian, Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) Bajak Gratis Kabupaten Tanah Datar, Tim Balai Penyuluh Pertanian, Petugas Brigade Alsintan, Petani atau Kelompok Tani, dan LSM. Dalam memastikan keabsahan data, dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi sumber, karena data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sumber informan atau beberapa sumber. Untuk mengolah data, menurut Bungin dalam (Karunia Galib et al. 2024) Data akan dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah yang diusulkan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan konfirmasi.

PEMBAHASAN

Faktor Pendukung Implementasi Program Bajak Gratis Brigade Alsintan Bagi Petani sebagai Program Unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar

Faktor pendukung dalam sebuah penelitian merujuk pada berbagai elemen atau kondisi yang membantu dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian sehingga dapat

mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor-faktor ini dapat berasal dari berbagai sumber dan berkontribusi terhadap kelancaran proses penelitian, validitas data, dan keberhasilan hasil akhir (Sugiyono, 2022). Sedangkan Menurut Syauckani (2006) dalam (Novan Mamonto, Ismail Sumampouw, and gustaf Undap 2018) menjelaskan bahwa implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu. Dengan adanya faktor pendukung, pelaksanaan program Bajak Gratis Brigade Alsintan dapat dilakukan dengan baik, memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara efektif dan mencapai hasil yang diinginkan.

1. Adanya Regulasi Kebijakan

Regulasi dan kebijakan yang jelas sangat penting untuk kesuksesan implementasi suatu program. Kebijakan yang terstruktur dengan baik dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program tersebut. Dengan adanya regulasi yang rinci, setiap langkah dan prosedur yang harus diikuti akan menjadi lebih jelas, sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyimpangan (Handityasa and Purnaweni 2017).

Dalam pelaksanaan program bajak gratis Faktor pendukung utama dari program bajak gratis brigade alsintan adalah adanya regulasi yang mengaturnya. Dasar hukumnya sudah 2 kali terbitkan dan direvisi yaitu yang terbaru Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 54 Tahun 2022 tentang perubahan Perbup Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pedoman Pelaksanaan Program Bajak Gratis. Regulasi ini memberikan panduan dan kerangka kerja yang pasti bagi semua pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah, manajer alsintan, hingga kelompok tani. Adanya regulasi yang jelas, proses pelaksanaan program dapat berjalan dengan lebih teratur dan transparan. Selain itu, dengan adanya regulasi memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan program dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga tujuan program untuk meringankan beban petani dapat tercapai. Adanya regulasi ini memastikan bahwa semua tahapan pelaksanaan program dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga program ini dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Penyuluhan,

Sarana, dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar Bapak Wel Embra S.P :

“...Regulasi yang mengatur program bajak gratis brigade alsintan memberikan kerangka kerja yang pasti dan jelas. Adanya Perbup Nomor 54 Tahun 2022 sebagai revisi dari Perbup Nomor 56 Tahun 2021 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyempurnakan program ini. Regulasi ini juga memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan dilakukan dengan transparan dan sesuai prosedur”

Kemudian adanya dasar hukum yang mengatur pelaksanaan program bajak gratis ini tidak terlepas dari dukungan penuh pemerintah daerah. Program bajak gratis ini merupakan bentuk nyata dari dukungan penuh Bupati Tanah Datar beserta seluruh jajarannya. Dengan adanya peraturan yang jelas dan dukungan dari pemerintah daerah, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi para petani di Tanah Datar, membantu meringankan beban mereka dalam mengolah lahan pertanian, dan meningkatkan produktivitas pertanian secara keseluruhan. Sebagaimana diungkapkan oleh PPTK Bajak Gratis Bapak Niko Aulia Amri S.T.,M.Si :

“... Dengan adanya dasar hukum ini, pelaksanaan program bajak gratis tidak terlepas dari dukungan penuh pemerintah daerah. Program ini diinisiasi dan didukung secara aktif oleh Bupati kita beserta seluruh jajarannya. Dukungan ini dapat dilihat dari beberapa aspek penting, seperti pengalokasian anggaran yang memadai, penyediaan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan program, serta koordinasi yang baik antar instansi terkait. Semua ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan bahwa program bajak gratis dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi para petani”

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Program bajak gratis brigade alsintan di Kabupaten Tanah Datar didukung oleh regulasi yang jelas, yang telah diterbitkan dan direvisi dua kali, dengan peraturan terbaru adalah Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 54 Tahun 2022. Regulasi ini memberikan panduan dan kerangka kerja yang pasti bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, manajer alsintan, dan kelompok tani. Adanya regulasi yang jelas memastikan setiap tahapan pelaksanaan program dilakukan sesuai prosedur, sehingga program dapat berjalan lebih teratur, transparan, dan sesuai dengan tujuannya untuk meringankan beban para petani. Dukungan penuh dari pemerintah daerah, termasuk Bupati Tanah Datar dan jajarannya, terlihat dari pengalokasian anggaran, penyediaan peralatan, dan koordinasi yang baik antar instansi. Dengan adanya dasar hukum yang kuat dan

dukungan dari berbagai pihak, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi para petani, membantu mereka dalam mengolah lahan pertanian, dan meningkatkan produktivitas pertanian secara keseluruhan.

2. Peran Penyuluh Pertanian

Penyuluhan pertanian berperan penting dalam mentransfer teknologi dan pengetahuan terbaru kepada petani, meningkatkan kapasitas dan keterampilan mereka melalui pelatihan, serta memberikan pendampingan dan konsultasi untuk menyelesaikan masalah spesifik di lapangan. Selain itu, penyuluhan pertanian membantu meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan produktivitas dan pendapatan, serta berkontribusi pada pengembangan masyarakat pedesaan secara keseluruhan. Dengan menyosialisasikan kebijakan pertanian pemerintah dan mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan, penyuluhan pertanian memainkan peran kunci dalam modernisasi sektor pertanian dan memastikan keberlanjutan serta kesejahteraan yang lebih baik bagi petani (Ishak et al 2021).

Pelaksanaan program bajak gratis ini tidak terlepas dari peran penting petugas di lapangan, khususnya Penyuluh Pertanian Lapangan. Mereka memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pengarahan, pembinaan, dan penyuluhan di bidang pertanian kepada para petani. Penyuluh Pertanian Lapangan ini dibekali dengan berbagai kemampuan, termasuk pengetahuan yang mendalam tentang pertanian, keterampilan yang diperlukan di lapangan, serta sikap profesional sebagai pengajar. Dengan bekal tersebut, mereka dapat menyampaikan materi kepada petani dengan cara yang efektif, sehingga informasi dan teknik yang diajarkan dapat dicerna dan dipahami dengan baik oleh petani. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan program, yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian, dapat tercapai dengan optimal. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar Ibu Sri Mulyani.,S.P.,M.Si :

“... Peran penyuluh pertanian dalam program bajak gratis ini sangat penting karena mereka bertanggung jawab memberikan pengarahan, pembinaan, dan penyuluhan langsung kepada para petani. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, para penyuluh memastikan bahwa petani dapat memanfaatkan alat dan mesin pertanian (alsintan) dengan efektif, sehingga hasil pertanian bisa lebih optimal”

Kemudian Penyuluh pertanian juga bertanggung jawab untuk membina hubungan baik dengan para petani, membantu memecahkan masalah yang mereka

hadapi di lapangan, dan memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan program sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Koordinator BPP Kecamatan Pariangan Ibu Rafines S.P :

“...Sebagai penyuluh pertanian, kami memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keberhasilan program bajak gratis ini. Kami tidak hanya memberikan arahan, pembinaan, dan penyuluhan kepada petani agar mereka mampu menggunakan alsintan dengan benar, tetapi juga membina hubungan yang baik dengan para petani dan membantu memecahkan masalah yang muncul di lapangan”

Hal yang sama dengan penjelasan informan diatas, bahwa peran penyuluhan pertanian menjadi ujung tombak dalam program bajak gratis ini. Penyuluh pertanian memiliki tanggung jawab besar untuk memberdayakan dan mendampingi petani dalam penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta dalam perawatannya. Mereka bertugas untuk memberikan edukasi yang mendalam tentang cara-cara yang efektif dalam mengoperasikan alsintan, teknik perawatan yang tepat, serta langkah-langkah pemeliharaan rutin yang harus dilakukan. Hal ini diungkapkan oleh Pejabat Pengelola Teknis (PPTK) Bajak Gratis Bapak Niko Aulia Amri S.T.,M.Si :

“...Penyuluh pertanian merupakan ujung tombak program ini. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan penyuluhan yang tepat, mendampingi petani dalam setiap tahap penggunaan alsintan, dan memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan”

Dari beberapa penjelasan diatas dapat dikatakan pentingnya peran Penyuluh Pertanian Lapangan yang bertanggung jawab memberikan pengarahan, pembinaan, dan penyuluhan kepada para petani. Dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional, mereka mampu menyampaikan materi secara efektif sehingga petani dapat memahami dan mengaplikasikan teknik yang diajarkan. Selain itu, penyuluh pertanian juga bertugas mendampingi petani dalam penggunaan dan perawatan alat mesin pertanian (alsintan) serta membina hubungan baik dengan petani untuk memecahkan masalah di lapangan.

Faktor Penghambat Impelementasi Program Bajak Gratis Brigade Alsintan Bagi Petani sebagai Program Unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar

Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan merujuk pada berbagai hambatan yang dapat mengganggu atau memperlambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

Hambatan-hambatan ini dapat muncul dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal, yang mencakup keterbatasan sumber daya seperti tenaga kerja, finansial, dan material, serta resistensi atau penolakan dari pihak-pihak yang terlibat atau terdampak oleh kebijakan. Selain itu, kurangnya kapasitas dan kemampuan institusi pelaksana, komunikasi yang tidak efektif antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan, serta kerangka hukum dan regulasi yang tidak mendukung juga dapat menjadi penghalang signifikan dalam proses implementasi kebijakan. Semua faktor ini, baik secara individu maupun kolektif, dapat menghambat tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut (Nalien 2021).

1. Terbatasnya Kuota Layanan

Terbatasnya kuota layanan merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program bajak gratis ini. Kekurangan kuota tersebut menyebabkan tidak semua petani dapat menikmati layanan yang disediakan oleh program ini secara merata. Hal ini mengakibatkan adanya ketidakmerataan dalam penerapan pola pola layanan bajak gratis yang lebih efisien, serta menimbulkan ketidakpuasan di kalangan petani yang belum mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan layanan bajak gratis tersebut. Hal ini diungkapkan oleh perwakilan Kelompok Tani (Poktan) Sawah Dibaruah Purma Indra :

“...Namun, sayangnya di Nagari Pariangan, yang terdiri dari beberapa jorong dan berbagai kelompok tani, dampak dari program bajak gratis ini belum sepenuhnya terasa. Hal ini disebabkan oleh kuota bajak gratis yang terbatas, sehingga masih banyak petani di sini yang belum mendapat kesempatan untuk memanfaatkannya”

Hal yang sama dijelaskan oleh informan sebelumnya, yaitu bahwa kuota layanan bajak gratis ini sudah ditentukan dan ditargetkan setiap tahunnya. Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar menetapkan jumlah lahan yang akan digarap setiap tahunnya berdasarkan anggaran yang tersedia dan kapasitas yang ada. Sebagaimana diungkapkan oleh Manajer Brigade Alsintan Kecamatan Pariangan Ibu Rizka Amelia S.P :

“...Untuk kuota layanan bajak gratis ini memang terbatas. Kami hanya menerima informasi mengenai total lahan yang akan digarap per kecamatan. Pembagian kuota tersebut berasal dari Dinas Pertanian, yang telah melakukan alokasi berdasarkan berbagai pertimbangan. Tugas kami di lapangan adalah menjalankan dan memastikan bahwa pembagian tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh dinas. Dengan demikian, meskipun jumlah kuota terbatas, kami berusaha untuk memastikan bahwa layanan dapat diberikan secara merata”

Jadi dapat dikatakan terbatasnya kuota layanan dalam program bajak gratis menjadi salah satu kendala utama. Kuota yang terbatas menyebabkan tidak semua petani dapat menikmati layanan ini secara merata, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakmerataan dalam penerapan program. Banyak petani mengungkapkan bahwa meskipun program ini sangat bermanfaat, jumlah petani yang bisa memanfaatkannya masih jauh dari cukup. Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar menetapkan jumlah lahan yang akan digarap setiap tahunnya berdasarkan anggaran yang tersedia, namun alokasi kuota masih perlu ditingkatkan agar program dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak petani.

2. Program Bajak Gratis Belum Prioritas Kebutuhan Petani

Program Bajak Gratis yang diluncurkan pemerintah bertujuan untuk meringankan beban petani dalam pengolahan lahan. Namun, pada kenyataannya, program ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan petani saat ini. Banyak petani merasa bahwa meskipun program ini bermanfaat, kebutuhan utama mereka sebenarnya terletak pada hal-hal lain yang lebih mendesak. Ketersediaan pupuk bersubsidi dengan harga terjangkau menjadi kebutuhan petani saat ini. Sebagaimana diungkapkan perwakilan Kelompok Tani (Poktan) Sawah Dibeulah Bapak Purma Indra :

“..saat ini kebutuhan utama kami sebagai petani adalah pupuk bersubsidi. Harga pupuk yang sangat mahal saat ini membuat kami mengalami kesulitan besar dalam menjalankan kegiatan pertanian sehari-hari. Pupuk bersubsidi sangat penting karena dapat meringankan beban biaya produksi yang kami hadapi”

Kebutuhan utama yang paling diperlukan oleh para petani saat ini adalah kuota pupuk bersubsidi dari pemerintah. Petani menekankan bahwa pupuk bersubsidi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung produktivitas pertanian mereka. Saat ini, harga pupuk di pasaran sangatlah mahal, sehingga banyak petani kesulitan untuk membeli pupuk dalam jumlah yang cukup. Hal ini diungkapkan anggota Kelompok Tani Ibu Zaiminar :

“..Iya, menurut saya, prioritas dalam pemberian pupuk bersubsidi sebaiknya ditingkatkan lagi. Saat ini, harga pupuk sedang sangat mahal, dan kuota pupuk bersubsidi juga semakin dikurangi. Kondisi ini tentu sangat memberatkan kami, para petani, yang sangat bergantung pada pupuk untuk memastikan hasil panen yang optimal. Jika saya harus memilih, saya lebih memilih mendapatkan pupuk bersubsidi daripada program bajak gratis ini. Meskipun program bajak gratis ini juga sangat

membantu dalam mengurangi beban biaya pengolahan lahan, namun kebutuhan akan pupuk bersubsidi masih menjadi prioritas utama bagi kami”

Ketersediaan pupuk masih sangat minim, sehingga banyak petani terpaksa harus membeli pupuk dengan harga yang tinggi di pasaran. Kondisi ini tentu berdampak signifikan terhadap biaya produksi mereka, yang pada akhirnya menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya. Keadaan ini menambah beban bagi para petani yang sudah menghadapi berbagai tantangan dalam proses pertanian mereka. Sebagaimana diungkapkan LBH Pusako Bapak Muhammad Intania S.H :

“..kurangnya ketersediaan pupuk subsidi. Pupuk subsidi sangat penting untuk membantu meringankan beban biaya produksi bagi petani. Namun, sering kali pasokan pupuk subsidi tidak mencukupi dan distribusinya tidak merata. Banyak petani yang harus membeli pupuk dengan harga tinggi di pasar, yang tentu saja berdampak pada biaya produksi mereka. Ketidaktersediaan pupuk subsidi ini membuat banyak petani kesulitan untuk mencapai hasil panen yang optimal”

Dari beberapa penjelasan informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Program Bajak Gratis yang diluncurkan pemerintah bertujuan untuk meringankan beban petani dalam pengolahan lahan, kenyataannya program ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan petani saat ini. Petani lebih memprioritaskan ketersediaan pupuk bersubsidi dengan harga terjangkau karena mahalnya harga pupuk di pasaran yang memberatkan biaya produksi mereka.

KESIMPULAN

Dengan merujuk pada hasil penelitian yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program bajak gratis brigade alsintan bagi petani, yang merupakan program unggulan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Faktor Pendukung, Pertama, adanya regulasi yang jelas, dengan dasar hukumnya Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022. Regulasi ini memberikan panduan dan kerangka kerja yang pasti bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, manajer alsintan, dan kelompok tani. Kedua, dukungan penyuluh pertanian, yang mana mereka bertanggung jawab memberikan pengarahan, pembinaan, dan penyuluhan kepada petani, serta mendampingi mereka dalam penggunaan dan perawatan alat mesin pertanian (alsintan). Peran

penyuluh ini sangat krusial untuk mencapai tujuan program dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan meringankan beban petani.

Faktor Penghambat, Pertama, terbatasnya kuota layanan dalam program bajak gratis, Kuota yang terbatas menyebabkan tidak semua petani dapat menikmati layanan ini secara merata. Kedua, Program Bajak Gratis belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan petani saat ini. Para petani lebih membutuhkan ketersediaan pupuk bersubsidi dengan harga terjangkau, karena harga pupuk yang mahal sangat memberatkan biaya produksi mereka.

REFERENSI

- Agustina, T., & Yusran, R. (2024). Peran Pemerintah dan Stakeholders dalam Mengatasi Dampak Pernikahan Dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(3), 229-238.
- Amelia, D., Suandi, S., & Wahyuni, I. (2022). Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Dan Penggunaan Faktor Produksi Lahan Dan Benih Terhadap Kinerja Usahatani Padi Sawah Di Kabupaten Kerinci. *Journal of Agribusiness and Local Wisdom*, 5(1), 80-90.
- Darmiyanti, R. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 5(2), 108-123.
- Galib, W. K., Irwan, A. L., Thaha, R., Prawitno, A., & Alfiani, N. (2024). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Air Bersih di Kota Makassar. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(3), 214-221.
- Hartati, S., Syamsuadi, A., & Arisandi, D. (2021, February). University Level Management Toward Industrial Revolution 4.0 using COBIT 5 Framework. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1783, No. 1, p. 012021). IOP Publishing.
- Mamonto, N., Sumampow, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw li Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Nalien, E. M. (2021). Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Bureaucratic Trimming Di Pemerintahan Kota Bukittinggi. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 1-13.
- Nasution, A. F. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Creative.
- Purnaweni, H. (2017). Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Izin Usaha Toko Modern Minimarket Waralaba/Cabang di Kecamatan Depok terkait

- Perda Kab. Sleman No. 18 tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 80-87.
- Rhian Dkincai. 2021. "Sektor Pertanian Sumbang 29,81% PDRB Tanah Datar." <https://www.portalberitaeditor.com/Eka-Putra-Sektor-Pertanian-Sumbang-2981-Pdrb-Tanah-Datar/>. Retrieved July 27, 2024 (<https://www.portalberitaeditor.com/eka-putra-sektor-pertanian-sumbang-2981-pdrb-tanah-datar/>).
- Riska, N., Rukmana, D., & Rukka, R. M. (2020). Strategi Pemanfaatan Program Brigade Alat Dan Mesin Pertanian (Bast). *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 16(1), 83-94.
- Sari Desva, indriani Yaktiworo, and Hasanuddin Tubagus. 2022. "Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Padi, Petani Jagung Dan Di Kota Metro Provinsi Lampung." *Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis: Journal of Agribusiness Science* 10(1):1–178.
- Simatupang, E. (2021). Implementasi Kebijakan Program Unggulan Pertanian Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di Era Pandemi COVID-19. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2).
- Sudarmansyah, S., Ruswendi, R., Ishak, A., Fauzi, E., Yuliasari, S., & Firison, J. (2021). Peran penyuluh pertanian dalam mendukung ketahanan pangan pada saat wabah pandemi Covid-19. *Jurnal Agribis*, 14(1).
- Sudaryono. 2018. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sujarweni. 2023. *Metode Penelitian : Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami*. Pustaka Baru Press.
- Syamsuadi, A., Febriani, A., Ermayani, E., Bunyamin, B., & Nursyiamah, N. (2023). Peran Lintas Sektor Dalam Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Rokan Hulu. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 6(1), 1-30.
- Syamsuadi, A., & Zainuddin, M. (2018). Strategi Pos Pemberdayaan Keluarga Dalam Penguatan Fungsi Kelembagaan Sosial Di Kelurahan Binawidya Kota Pekanbaru. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 1(2), 98-109.
- Tahir, S. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN ALSINTAN DI KABUPATEN SINJAI. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(1), 115-136.
- Trisnawati, L., Syamsuadi, A., Hartati, S., & Reskiyanti, I. (2021). Koordinasi pemerintah dan swasta dalam program corporate social responsibility (csr) school improvement di

Kabupaten Pelalawan. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 3(2), 115-123.

Wijaya, A. K., Noor, M., & Surya, I. (2018). Strategi Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Kehutanan Dalam Meningkatkan Produktivitas Pertanian di Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 737-748.

Yanti, M., Kusmiah, N., & Baso, A. (2020, May). Analisis Penggunaan Alsintan Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Padi Sawah Di P4s Haji Ambona Yanda (Studi Kasus Desa Paku Kecamatan Binuang). In *Journal Pegguruang: Conference Series* (Vol. 2, No. 1, pp. 110-115).